

NASKAH PUBLIKASI

**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA WAKAF AKIBAT
PENGUASAAN ATAS TANAH WAKAF OLEH AHLI WARIS WAKIF
(Studi Putusan Nomor: 464/Pdt. G/2010/PA.Bgr)**



Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

ARSIN TSUWAEBAH
NIM: C. 100.110.216

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Mutimatur Ni'ami, S.H., M.Hum)

Pembimbing II

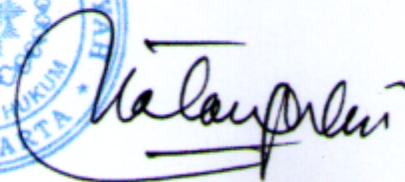


(Aristya Windiana Pamuncak, S.H LLM)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA WAKAF AKIBAT
PENGUASAAN ATAS TANAH WAKAF OLEH AHLI WARIS WAKIF
(Studi Putusan Nomor: 464/Pdt.G/2010/PA.Bgr)**

ARSIN TSUWAEBAH

NIM: C.100.110.216

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015

arsintaka@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu alasan Pembentukan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab tanah wakaf dikuasai oleh ahli waris *wakif* adalah tidak adanya profesionalisme dan tanggung jawab *nazhir* sehingga tanah wakaf dengan mudahnya dapat dikuasai oleh ahli waris *wakif*. Sehubungan dengan tidak difungsikannya tanah wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yang sebenarnya, dikhawatirkan pahala dari harta yang diwakafkan oleh *wakif* akan berhenti mengalir, tentunya ini akan merugikan *wakif* yang telah tiada. Akhirnya harta wakaf kehilangan fungsi dan porsi yang diharapkan oleh *wakif*.

Kata kunci: Pengadilan Agama Bogor, Ketidakprofesionalan *Nazhir*, *Wakif*, Ahli Waris *Wakif*

ABSTRACT

To regulate the administrative works of waqf, Bill Number 41/2004 was legalized. The legal background of the bill issue was the disarray and inefficiency of waqf regulation and administration. The facts that some of the waqf is in the state of abandonment, displacement, and illegal ownership are evidences for the necessity for a comprehensive regulation to administer the waqf properties. This research reveals that the principal factors causing the inheritors of the waqf to possess and control the waqf is the absence of professionalism and responsibility of the nazhir, the appointed official assigned to administer and manage the waqf. The defects in the professionalism and responsibility of the nazhir elicited the inheritors to own and control the waqf. Regarding with the fact that the waqf is not properly functioned as demanded by the objectives of the waqf, it is feared that, from the religious perspectives, the reward from Allah the Almighty will stop pouring the wakif due to the mistreatment on the functions of the waqf.

Keywords: Religious Courts of Bogor, Incompetence of The *Nazhir*, *Waqif*, *Waqif's Inheritors*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha-Nya.¹ Salah satu alasan Pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.²

Di samping itu, karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf masuk dalam siklus perdagangan. Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari tujuan wakaf yang sesungguhnya dan juga akan mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam sebagai eksese penyelewengan wakaf, sebab tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di Pengadilan.³

Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasar pada rasa saling percaya, yaitu *wakif* hanya menyerahkan tanah wakaf kepada seorang *nazhir* tanpa dibarengi dengan adanya pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sejenisnya. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf

¹ Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, hal. 1.

² Jaih Mubarak, 2008, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, hal. 58.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hal. 2.

penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian. Dalam perkara lain, hal yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik wakaf di Indonesia adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris *wakif* dan tanah wakaf dikuasai secara turun-temurun oleh *nazhir* yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf. Dalam praktik sering didengar dan dilihat adanya tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris *wakif* setelah *wakif* tersebut meninggal dunia. Akan tetapi khusus untuk wakaf tanah, ketentuan pembuatan akta ikrar wakaf telah menghapuskan kepemilikan hak atas tanah yang diwakafkan sehingga tanah yang telah diwakafkan tersebut tidak dapat diminta kembali.

Pada dasarnya, benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan. Dalam sabda Rasulullah SAW telah dijelaskan bahwa benda wakaf tidak bisa diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan⁴ dalam hadits Umar Radhiyallahu 'anhu :

أَنْهَلَيْبَا عَوْلَايُو هَبْوَ لَيُورَتْ

(Sesungguhnya tanah wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwaris [HR Bukhari])

Dalam pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dijelaskan:

“ Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari yang dimaksud dalam ikrar wakaf ”

Dalam kenyataan, pada umumnya harta wakaf yang tidak didata dengan sebaik-baiknya akan berujung pada perselisihan ketika *wakif* telah meninggal

⁴ Siah Khosyi'ah, 2010, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, hal. 95.

dunia, sebab antara *wakif* dan *nazhir* tidak ada dokumen yang menguatkan posisi kedua belah pihak bila keadaan semacam ini telah terjadi, maka tidak ada pihak yang berwenang yang dapat bertindak sebagai penengah dengan data tertulis yang jelas, akhirnya harta wakaf kehilangan fungsi dan porsi yang diharapkan oleh *wakif*.⁵

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: *pertama*, apa faktor penyebab dan akibat hukum penguasaan tanah wakaf oleh ahli waris waris *wakif* dalam putusan nomor: 464/pdt.G/2010/PA.Bgr? *Kedua*, bagaimana pertimbangan hakim serta akibat hukumnya dalam penyelesaian perkara wakaf dalam putusan nomor: 464/Pdt.G/2010/PA.Bgr? *Ketiga*, bagaimana peran Pemerintah dalam pengawasan terhadap kinerja *nazhir*?

Tujuan penelitian ini adalah: *pertama*, untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya sengketa wakaf akibat dari tanah wakaf yang dikuasai oleh ahli waris *wakif* serta mengetahui akibat hukum yang terjadi apabila tanah wakaf dikuasai oleh ahli waris *wakif*, sehingga diharap pengetahuan ini akan meminimalisasi sengketa wakaf; *kedua*, untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam hal pembuktian untuk memutus dan menyelesaikan sengketa wakaf dalam putusan Pengadilan Agama Bogor nomor: 464/Pdt.G/2010/PA.Bgr; *ketiga* untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah dalam mengawasi kinerja *nazhir* dengan tujuan pencegahan terjadinya sengketa wakaf akibat tidak berdayanya *nazhir* dalam pengelolaan tanah wakaf.

Manfaat penelitian ini adalah: *pertama*, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan ilmu hukum terkait dengan wakaf,

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hal. 65.

serta dapat memberikan sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah) bagi akademisi tentang penyelesaian sengketa wakaf;*kedua*, diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran bagi usaha pengaturan, penataan, peningkatan, pembinaan, pengolahan dan pengawasan perwakafan tanah di Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang sering kali disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal biasanya hanya menggunakan atau bersaranakan pada sumber data sekunder saja yakni, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori maupun konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum terkemuka.⁶Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab dan Akibat Penguasaan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif Dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 464/Pdt.G/2010/PA.Bgr

Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab sengketa wakaf. Dalam putusan Pengadilan Agama Bogor nomor: 464/Pdt.G/2010/PA.Bgr terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab dikuasainya tanah wakaf oleh ahli waris wakif yaitu:

Pertama, masalah *resource*. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, tentu saja dengan demikian tanah memiliki

⁶ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 11.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 166.

kedudukan yang istimewa bagi semua orang karena tidak dapat diperbaharui itulah yang menjadikan harga tanah sangat mahal. Sehubungan dengan hal tersebut pihak ahli waris *wakif* melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap tanah yang sudah diwakafkan dengan cara menjual sebagian tanah wakaf dan hasil dari penjualan tanah wakaf tersebut digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Ahli waris dari *wakif* tidak mengakui adanya ikrar wakaf, salah satu faktornya adalah dengan memanfaatkan tanah tersebut dapat menghasilkan sejumlah uang yang dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan keluarganya.

Kedua, masalah *interest* atau *needs* yaitu kepentingan atau kebutuhan yang berbeda. Di sini ahli waris *wakif* merasa berhak atas tanah yang telah diwakafkan. Ahli waris merasa bahwa orang tuanya yaitu H. Anwar Bin H. Subki telah mewariskan sebidang tanah, padahal tanah tersebut adalah tanah wakaf yang diwakafkan oleh nenek buyut ahli waris yaitu Hj. Arnas bin H. Thoyib. Di sisi lain yaitu adalah H. Ijudin Taupikilah, selaku Ketua Dewan Keluarga Masjid/Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Jami Al-Munawaroh yang juga mempunyai kepentingan menjaga fungsi dan peruntukan tanah wakaf tersebut. Tujuan utama Hj. Arnas mewakafkan hasil dari pengolahan tanah wakaf yaitu untuk diserahkan kepada Masjid Jami Al-Munawaroh.

Ketiga, masalah *values* yaitu penyebab sengketa tanah pada putusan Pengadilan Agama Bogor nomor: 464/Pdt.G/2010/PA.Bgr pada dasarnya adalah tidak diserahkannya hasil dari pengelolaan tanah yang telah diwakafkan kepada masjid Jami Al-Munawaroh, meskipun tanah tersebut telah ditegaskan sebagai tanah wakaf. Dalam hal ini terjadi benturan nilai agama untuk tetap menggunakan

dan memanfaatkan tanah wakaf sesuai dengan fungsi dan peruntukannya dengan motivasi ekonomi dari ahli waris *wakif*, mengingat nilai jual dari tanah yang semakin tinggi.

Keempat, masalah *relationship* dan *information*, menurut penulis faktor inilah yang menjadi faktor yang sangat mempengaruhi sengketa wakaf yang telah terjadi, karena hubungan kekeluargaan antara *wakif* dan ahli warisnya telah memicu anggapan dari pihak ahli waris bahwa tanah yang sudah diwakafkan adalah tanah warisan dari orang tuanya, sehingga ahli waris *wakif* merasa berhak untuk menjual tanah itu kepada pihak lain.

Kelima, masalah *tidak adanya kepengurusan nazhir*, ditegaskan dalam gugatan yang telah diajukan oleh penggugat bahwa pada tahun 1938 tanah seluas $\pm 5.666 \text{ M}^2$ (lima ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi) oleh Hj. Arnas Binti H. Thoyib telah diwakafkan kepada Masjid Jami Al-Munawaroh yang kemudian tanah wakaf tersebut akan dikelola dan hasilnya sebagian diserahkan untuk membiayai kegiatan dan pembangunan Masjid tersebut. Orang yang diberi amanat untuk mengurus dan mengelola/*nazhir* tanah wakaf tersebut adalah Ardai, setelah Ardai meninggal dunia maka yang menjadi *nazhir* tanah wakaf tersebut adalah putra dari Ardai yang bernama Toha Bin Ardai.

Kurang lebih pada tahun 1960 pengurusan dan pengelolaan tanah wakaf tersebut diambil alih oleh salah satu anak dari Hj. Arnas Binti H. Thoyib, sehingga sejak saat itu yang menjadi *nazhir* dari tanah wakaf adalah H. Subki Bin Abdul Majid. Terlihat tidak adanya profesionalisme dan tanggung jawab *nazhir* karena sebagai seorang *nazhir* H. Subki menjual sebagian dari tanah wakaf yang telah diwakafkan, dengan tidak adanya kejelasan dan kepengurusan oleh

nazhirmaka tanah wakaf akhirnya dikuasai oleh ahli waris *wakif* dan menjadi sengketa tanah wakaf.

Akibat Penguasaan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris *Wakif* Dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 464/Pdt.G/2010/PA.Bgr

Pada sengketa wakaf dalam putusan Pengadilan Agama Bogor nomor: 464/Pdt.G/2010/PA.Bgr memang tidak terdapat dokumen yang menguatkan baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat sehingga terjadi sengketa wakaf. Pada pihak Penggugat hanya mempunyai surat hasil musyawarah keluarga yang berisi tentang penegasan kembali tanah wakaf yang telah diwakafkan tanpa dibarengi dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), sedangkan pada pihak Tergugat hanya mempunyai Akta Kewarisan dari tanah wakaf yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan dikuasainya tanah wakaf oleh ahli waris *wakif*, fungsi dan porsi yang diharapkan oleh *wakif* terhadap tanah wakaf yang diwakafkan menjadi hilang.

Tanah wakaf yang telah dikuasai oleh ahli waris *wakif* sama sekali tidak difungsikan sebagaimana tujuan utama dari *wakif* untuk mewakafkan tanahnya. Sehubungan dengan tidak difungsikannya tanah wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yang sebenarnya maka dikhawatirkan pahala dari harta yang diwakafkan oleh *wakif* akan berhenti mengalir, tentunya ini akan merugikan *wakif* yang telah tiada, begitu juga apabila tanah wakaf yang dikuasai tersebut berhasil terjual hanya untuk keuntungan pribadi saja.

Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Wakaf Dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 464/Pdt.G/2010/PA.Bgr

Pada tahun 1938 wakaf yang dilakukan oleh Hj. Arnas dilakukan dengan cara yang masih tradisional yaitu dilakukan atas dasar kepercayaan saja. Wakaf dilakukan hanya berdasar rasa kepercayaan, sehingga ikrar wakaf tidak didaftarkan kepada Bupati, karena memang pada tahun sebelum kemerdekaan rasa percaya umat Islam terhadap peraturan yang berbentuk surat edaran dinilai masih ada campur tangan dari pihak kolonial Belanda. Dengan tidak adanya pendaftaran tanah wakaf ataupun Akta Ikrar Wakaf (AIW), maka hakim dalam mencari kebenaran yang sesungguhnya mengutamakan pembuktian dari keterangan para saksi yang memang melihat dengan mata kepala sendiri kejadian perwakafan tersebut. pesan secara turun temurun tentang wakaf yang tidak ada bukti surat wakafnya dapat dibenarkan menurut hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Tanggal 25 Nopember 1975 Nomor: 239K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa: *“apabila peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, akan tetapi berdasarkan pesan turun temurun, sedang saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu sudah tidak ada dan telah meninggal dunia, maka dari pesan turun temurun itulah dapat dinilai sebagai keterangan saksi”* dan bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dalam kitab Al Anwar Juz I halaman 438 sebagai berikut : *“Apabila beberapa saksi memberi kesaksian berdasarkan apa yang mereka dengar, maka ditetapkan wakaf itu berdasarkan kesaksian tersebut.”*

Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat tidak melihat langsung dan mengetahui langsung proses pewarisan yang terjadi atas tanah tersebut,

melainkan hanya mendengar dari H.Subki dan istri-istri H.Subki, maka kesaksian semacam itu disebut *Testimonium de auditu* atau dalam istilah fiqh disebut saksi *Istifadhoh*, maka kesaksian semacam ini tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 171 HIR, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi para Tergugat tidak dapat diterima oleh hakim. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi yang kuat dari Penggugat maka kasus sengketa wakaf tersebut dimenangkan oleh pihak Penggugat dengan menghukum para Tergugat yang saat ini menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat.

Pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung atas Banding Nomor: 56/Pdt.G/2011/PTA.Bdg yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding, Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada intinya menguatkan putusan dari hakim Pengadilan Agama Bogor dan tetap menghukum para Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebagai tanah wakaf yang sah.

Bentuk Peranan Pemerintah Dalam Pengawasan Terhadap Kinerja *Nazhir*

Institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf adalah Menteri Agama.⁸ Menteri Agama mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf.⁹ Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan

⁸Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 63, ayat (1).

⁹Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 63, ayat (2).

penyelenggaraan wakaf.¹⁰ Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu, untuk pembinaan penyelenggaraan wakaf.¹¹ Sedangkan dalam pengawasan penyelenggaraan wakaf, Menteri Agama dapat menggunakan akuntan publik.¹² Ketentuan ini bersifat pilihan. Oleh karena itu, jika dipandang perlu Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia bekerja sama dengan lembaga lain.

Pada Kantor Kementerian Agama Surakarta mempunyai program Pembinaan dan Pemberdayaan wakaf, sehingga Kementerian Agama Surakarta dapat melaksanakan kegiatan untuk pembinaan *nazhir* dan program pembinaan ada dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Program pembinaan tersebut dilaksanakan dengan cara salah satunya adalah diadakannya Rapat Koordinasi Wakaf atau Rapat Koordinasi *Nazhir*. Program pengembangan *nazhir* dilaksanakan dengan Bantuan Sertifikat Wakaf, mengikutsertakan *nazhir* dalam kegiatan pengembangan wakaf produktif dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan wakaf. Sedangkan peran Kementerian Agama Surakarta dalam pengawasan *nazhir* yaitu sebagai pembina dan motivator untuk pemberdayaan dan pendayagunaan tanah wakaf.¹³

¹⁰Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 63, ayat (3).

¹¹Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 64.

¹²Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 65.

¹³Ahmad Arifin, Staff Bagian Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 11 Juni 2015, pukul 11:17 WIB.

PENUTUP

Kesimpulan

Faktor Penyebab dan Akibat Dikuasainya Tanah Wakaf oleh Ahli Waris Wakif

Faktor penyebab dikuasainya tanah wakaf oleh ahli waris *wakif* adalah: *Pertama*, masalah *resource*, pihak ahli waris *wakif* melakukan penyimpangan atau pelanggaran dengan cara menjual tanah wakaf untuk pemenuhan kepentingan pribadi. *Kedua*, masalah *interest* atau *needs* yaitu kepentingan atau kebutuhan yang berbeda, disatu sisi ahli waris *wakif* berkukuh bahwa tanah yang telah diwakafkan adalah tanah warisan, dan dilain sisi adalah pengelola masjid yang mempunyai kepentingan untuk menjaga fungsi dan peruntukan tanah wakaf tersebut. *Ketiga*, masalah *values*, dalam hal ini terjadi benturan nilai agama untuk tetap menggunakan dan memanfaatkan tanah wakaf sesuai dengan fungsi dan peruntukannya dengan motivasi ekonomi dari ahli waris *wakif*. *Keempat*, masalah *relationship* dan *information*, yaitu minimnya informasi dari keluarga yang menyebabkan suatu kondisi yang dipicu oleh kurangnya informasi dari orang tua ahli waris *wakif* secara tegas bahwa tanah sengketa merupakan tanah wakaf. *Kelima*, masalah tidak adanya kepengurusan *nazhir*, tidak adanya profesionalisme dan tanggung jawab *nazhir* sehingga tanah wakaf dengan mudahnya dapat dikuasai oleh ahli waris *wakif*.

Akibat dari tanah wakaf yang dikuasai oleh ahli waris *wakif* adalah tanah wakaf sama sekali tidak difungsikan sebagaimana tujuan utama dari *wakif* untuk mewakafkan tanahnya. Sehubungan dengan tidak difungsikannya tanah wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yang sebenarnya, dikhawatirkan pahala dari harta yang diwakafkan oleh *wakif* akan berhenti mengalir, tentunya ini akan merugikan

wakif yang telah tiada. Akhirnya harta wakaf kehilangan fungsi dan porsi yang diharapkan oleh *wakif*.

Pertimbangan Hakim Terhadap Pembuktian Dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 464/Pdt.G/2010/PA.Bgr

Pada tahun 1938 wakaf yang dilakukan oleh Hj. Arnas dilakukan dengan cara yang masih tradisional yaitu dilakukan atas dasar kepercayaan saja tanpa ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sejenisnya. Sehingga ikrar wakaf tidak didaftarkan kepada Bupati, karena memang pada tahun sebelum kemerdekaan rasa percaya umat Islam terhadap peraturan yang berbentuk surat edaran dinilai masih ada campur tangan dari pihak kolonial Belanda. Dengan tidak adanya pendaftaran tanah wakaf ataupun akta ikrar wakaf, maka hakim dalam mencari kebenaran yang sesungguhnya, dengan mengutamakan pembuktian dari keterangan para saksi yang memang melihat dengan mata kepala sendiri kejadian perwakafan tersebut.

Peran Pemerintah Terhadap Pengawasan *Nazhir*

Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif: *Pengawasan Aktif* dilakukan dengan memeriksa langsung terhadap *nazhir* atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan *Pengamatan Pasif* dilakukan dengan mengamati berbagai laporan yang disampaikan *nazhir* berkaitan dengan pengelolaan wakaf. Sedangkan peran Kementerian Agama Surakarta dalam pengawasan *nazhir* yaitu sebagai pembina dan motivator untuk pemberdayaan dan pendayagunaan tanah wakaf.

Saran

Pertama, kepada para *nazhir* seharusnya bersifat profesional. Oleh karena itu, semua pihak kiranya layak berpartisipasi, baik pemerintah itu sendiri maupun masyarakat dalam membentuk *nazhir* yang memenuhi syarat moral yaitu *amanah* (dapat dipercaya), *shidiq* (jujur), *fathanah* (cerdas), *tablig* (transparan) dan dapat mengembangkan harta benda wakaf sehingga harta benda wakaf yang dikelola sesuai dengan tujuan *wakif*.

Kedua, kepada Kantor Kementerian Agama seharusnya melakukan pencatatan atau pendataan kembali status harta benda wakaf yang diwakafkan pada tahun sebelum kemerdekaan, dimana wakaf yang dilakukan pada tahun-tahun tersebut sama sekali atau belum didaftarkan atau dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW), agar jelas status wakafnya dan terhindar dari sengketa yang diakibatkan tidak adanya bukti tertulis atau bukti otentik perwakafan terhadap harta benda wakaf.

Ketiga, kepada Menteri Agama perlu membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) ditingkat Kabupaten/Kota agar pengawasan dan pembinaan terhadap *nazhir* semakin fokus sampai ditingkat kota dan tidak hanya berpusat di Ibu Kota saja.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Anshori, Abdul Ghofur, 2005, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media.

Khosyi'ah, Siah, 2010, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Mubarok, Jaih, 2008, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.